

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota.

Rencana Kerja Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2008 – 2013 dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPMPD Kab. Lombok Timur yang termuat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, bahwa salah satu upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat dan dalam rangka itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur

B. Gambaran Umum

Jumlah karyawan/karyawati pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur sebanyak 43 orang.

- Menurut Golongan/Ruang
 - a. Golongan IV : 5 orang
 - b. Golongan III : 22 orang
 - c. Golongan II : 12 orang
 - d. Golongan I : 2 Orang

- Menurut Pendidikan
 - a. S-2 : 2 orang
 - b. S-1 : 22 orang
 - c. D3 : 2 orang
 - d. SLTA : 14 orang
 - e. SMP : 3 orang

- Menurut Eselon
 - a. Eselon II B : 1 orang
 - b. Eselon III A : 1 orang
 - c. Eselon III B : 4 orang
 - d. Eselon IV A : 9 orang belum terisi 2 orang

- Staf : 26 Orang

- Honor Daerah : 2 Orang

Bangunan BPMPD Kabupaten Lombok Timur seluas 1.350 m², termasuk aula dengan luas 112.125 m².

Sarana transportasi yang dimiliki BPMPD sampai saat ini berjumlah :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) : 27 buah
- b. Kendaraan roda 4 (empat) : 4 buah

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Timur, dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai salah satu lembaga teknis daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun rencana strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengembangan ketahanan masyarakat, social budaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa dan tehnologi tepat guna serta pembinaan pemerintahan desa;
- 4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 5) Melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
- 4) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
- 5) Bidang Usaha Ekonomi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- 6) Bidang Pemanfaatan SDA dan TTG, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemanfaatan SDA dan Prasarana Desa;
 - b) Sub Bidang Pengembangan TTG.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

BAB II

RENCANA STRATEGIK

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur ditetapkan Rencana Strategik sebagai pedoman bagi aparat BPMPD khususnya dan pihak lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

1. Visi

Penetapan Visi bagi suatu instansi dimaksudkan untuk memberikan arah bagi suatu instansi termasuk anggotanya mengenai tujuan masa depan yang ingin dicapai sehingga keberadaannya tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur serta mengacu pada Renstra Kabupaten Lombok Timur, maka Visi ke depan adalah ***“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat di Pedesaan dengan Pemerintahan Desa yang Sehat, Profesional dan Otonom di Bawah Lindungan Allah SWT ”***

2. Misi

Untuk mendukung tercapainya Visi yang sudah ditetapkan dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Ada 3 (tiga) Misi yang di emban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri melalui :

- Pemanfaatan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
 - Pemanfaatan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
 - Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
 - Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.
2. Memperkuat kapasitas Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Pemeran Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa agar mampu meminage sesuai dengan kaidah pemerintahan yang baik.

3. Tujuan Dan Sasaran

1. Membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat dikawasan perdesaan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan ditingkat lokal dalam mengelola pembangunan diperdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan sasaran :
 - a. Penataan dan penguatan institusi dan kelembagaan masyarakat desa;
 - b. Peningkatan peran kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat;
 - d. Pemberdayaan forum desa dan BPD;
 - e. Pembinaan dan memfungsikan pokjanal TTG kabupaten, kecamatan dan posyantekdes;
 - f. Fasilitasi dan pembinaan posyandu

- g. Pembinaan revitalisasi posyandu;
 - h. Penilaian kinerja posyandu;
 - i. Operasional kader posyandu;
 - j. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) siswa SD/MI/Ponpes;
 - k. Pembinaan administrasi PNPM-MP;
 - l. Pendataan dan analisa perkembangan dan potensi desa/kelurahan (profil desa/kel).
2. Pemberdayaan usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi sumber daya ekonomi perdesaan secara optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dengan sasaran :
- a. Study kajian potensi ekonomi desa dan pembinan BUMdes;
 - b. Meningkatnya kemampuan usaha produktif kelompok/lembaga ekonomi desa/kelurahan;
 - c. Pembinaan dan monitoring pokmas IDT;
 - d. Pilot project desa mandiri eneri (DME) dan monitoring DME;
 - e. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha kecil menengah (UKM) di pedesaan;
 - f. Pelatihan pengelolaan pasar desa;
 - g. Fasilitasi manajemen LPMD dan stimulan LMPD;
 - h. Analisis kemiskinan partisipatif;
 - i. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong menuju penguatan integritas social melalui kegiatan-kegiatan gotong royong baik berupa fikiran, tenaga dan finansial dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya dengan sasaran-sasaran :

- a fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes/kel;
 - b Terwujudnya pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni;
 - c Monev dan pelaporan pembangunan pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni;
 - d Peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - e Monev swadaya murni masyarakat;
 - f Pemberian stimulan peningkatan, pemanfaatan, pengembangan air bersih perdesaan;
 - g Pemberian stimulan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat pesisir;
 - h Pemantapan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD);
 - i Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan;
 - j Pembinaan Desa/Kelurahan Juara dan Study Banding.
4. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang akuntabel dan profesional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sasaran :
- a Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemdes (bintek perangkat desa dan anggota BPD);
 - b Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa (bintek desa/kel);
 - c Bintek penyusunan peraturan desa;
 - d Monev dan pelaporan penyelenggaraan pemdes/kel.;
 - e Bintek penyusunan APBDes/Kelurahan;
 - f Pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD/K;
 - g Pemilihan Kepala Desa;
 - h Pembentukan BPD;
 - i Penyelesaian permasalahan antar desa desa/kel.;
 - j Penyelesaian kades, BPD dan perangkat;
 - k Biaya pengobatan bagi perangkat desa desa se-kab. lotim;
 - l Pembayaran premi asuransi bagi perangkat desa se-kab. lotim;
 - m Study banding kades dan ketua LKMD/K;
 - n Bintek pengurus LKMD/K;
 - o Pembinaan kaur trantib;

- p Pemilihan kadus/kapling;
 - q Penyusunan perda dan perbup;
 - r Pemekaran desa/dusun.
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam ekonomi produktif, meningkatkan status pendidikan perempuan, meningkatkan status kesehatan perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat dengan sasaran :
- a Pembinaan dan peningkatan ketrampilan usaha perempuan;
 - b Fasilitasi dan pembinaan PPKSS;
 - c Bantuan pembinaan PKK kabupaten, kecamatan dan desa;
 - d Pengendalian operasional KPKK di desa SIAGA;
 - e Pemberian bantuan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) melalui PNPM-MP.
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan pengelolaan sarana dan prasarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat sendiri serta pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
- a. Pembinaan peranserta masyarakat perdesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - b. Inventarisasi dan identifikasi SDA serta potensi SDA;
 - c. Berkembangnya inisiatif dan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana desa serta lingkungan hidup;
 - d. Kemasyarakatan dan sosialisasi hasil-hasil penemuan karya TTG;
 - e. Penerapan dan pengembangan TTG di pedesaan;
 - f. Gelar TTG tingkat propinsi;
 - g. Gelar TTG tingkat nasional;
 - h. Pembinaan pada mahasiswa KKN dalam penyebarluasan TTG.

4. Kebijakan program dan kegiatan

4.1. Kebijakan meningkatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Operasional Kader Posyandu;
- b. Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
- c. Pembentukan Pokja Profil Desa dan Kelurahan

4.2. Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi Desa Mandiri Energi
- b. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat.

4.3. Kebijakan Pemantapan Kehidupan Social Budaza Masyarakat, dengan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- b. Pencanaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- c. Pengelolaan, Pemanffatan dan Pengembangan Sarana Air Bersih Perdesaan.

4.4. Kebijakan Pamantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dengan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah :

- a. Monitoring Evaluasi dan Laboran Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

- b. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Bintang Selaparang.
 - c. Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- 4.5. Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perempuan, Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Perdesaan, dengan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan .
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah :
- a. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sehat Sejahtera (PPKSS)
- 4.6. Kebijakan Peningkatan Perlindungan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penataan Lingkungan Perdesaan, dengan Program Peningkatan Pemanfaatan TTG dan peningkatan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah :
- a. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Propinsi.
 - b. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional.

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

1. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Tahun 2010 sebagai berikut :

No	Sasaran			
	Uraian	Indikator	Rencana Tk Capaian	
			Sat	Vol
1.	Ops Kader Posyandu	- Aktifitas Kader meningkat	orang	5200
2.	Pembinaan Adminstrasi PNPM-MP	- Tersedianya biaya monev dan pelaporan - Terlatihnya Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris desa Persiapan	D/K Orang	61 Ds 9 Kec. 62
3.	Pembentukan Pokja Profil Desa dan Kelurahan	- Terbentuknya Pokja	Pokja	1
4.	Monitoring Desa Mandiri Energi	- Tersedianya biaya monev dan pelaporan	Pokja Lahan	1 62 Ha
5.	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masy.	- Terinventarisasi & terbinanya klp usaha mikro kecil dan Bumdes	Klp	48
6.	Fasilitasi Musrenbangdes /Kel	- Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbangdes/kel	D/K	30
7.	Pencanangan Keg Bulan Bakti Gotong Royong Masy	- Terlaksananya pencanangan BBGRM tk. Kabupaten	Kec	1
8.	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengembangan SAB Perdesaan.	- Terlaksananya Pembinaan Adm dan Tekhnis	Desa	1
9.	Monev dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemdes /Kel	- Pembinaan dan evaluasi desa persiapan - Monev ADD/K - Pemeriksaan Adm usulan dan survey kelayakan pemekaran desa - Peresmian desa persiapan - Monev Pemilihan Kades - Monev Pembentukan BPD - Monev Pemilihan Kadus dan peremajaan Kaur. - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kel	Desa D/K Desa Desa D/K D/K orang	31 150 20 20 11 4
10.	Pelaksanaan Lomba Desa dan Kel Bintang Selaparang	- Terpilihnya Ds/Kel Juara	D/K	4
11.	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan Daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi	Kali	2
12.	Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sehat Sejahtera	- Terbinanya Desa/Kel lokasi PPKSS	D/K	2
13.	Gelar TTG Tk. Propinsi	- Mempromosikan produk unggulan dan hasil temuan	paket	1
14.	Gelar TTG Tk. Nasional	Mempromosikan produk unggulan dan hasil temuan	paket	1

2. Program dan Kegiatan

Program-program yang ditetapkan dalam rencana stratejik merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kebijakan dan program yang ada dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok : masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dampak (Impact).

Rencana kinerja tahunan BPMPD Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Sat.	Rencana Tk. Capaian (Target)
1. Peningkatan Keberdayaan Masy Perdesaan	a. Operasional Kader Posyandu	Masukan : Dana Keluaran : Aktivitas Kader Meningkatkan Hasil : Kehadiran Sasaran Posyandu Meningkatkan Manfaat : Kesehatan masyarakat terpantau Dampak : Derajat kesehatan meningkat	Rp. Org %	1.300.000.000 5.200 80
	b. Pembinaan Administrasi PNPM-MP	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya biaya PAP monitoring, Evaluasi dn pelaporan Hasil : Percepatan pemerataan pembangunan Desa Manfaat : Meningkatnya partisipasi masyarakat	Rp. d/k %	250.000.000 61 50
2. Pengem Lembaga Ekonomi Perdesaan	c. Pembentukan Pokja Profil Desa/Kel	Dampak : Berkurangnya RTM Masukan : Dana Keluaran : Terbentuknya Pokja Hasil : Tersusunnya Renja Pokja Manfaat : Terbentuknya Tim Pembina Profil Dampak : Tersusunnya Profil Desa/Kel	Rp. Pokja %	6.500.000 1 100
	a. Monev DME	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya biaya Monev & Pelaporan Hasil : Terbinannya Pokja Petani Jarak Manfaat : Sumber Energi Alternatif	Rp. Pokja Lhn %	7.000.300 1 62 Ha 40

3	Peningkatan Partisipasi Masy dlm membangun Desa	b. Monev Usaha Eko Masy	Dampak : Meningkatkan pendapatan masyarakat		
			Masukan : Dana	Rp.	35.000.000
			Keluaran : Terinventarisasi dan terbinanya klp Usaha mikro dan Bumdes	klp	48
		a.. Fasiltasi Musrenbangdes/ Kel	Hasil : Data Klp Usaha Mikro dan Bumdes	%	20
			Manfaat : Untuk mempermudah pembinaan		
			Dampak : Meningkatkan pendapatan usaha mikro		
		b. Pencanaan Keg BBGRM	Masukan : Dana	Rp.	8.000.000
			Keluaran : Terfasilitasinya Musrenbangdes/Kel	D/K.	30
			Hasil : Tersusunya RPTD Desa/Kel	%	20
c. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengembangan SAB Perdesaan	Manfaat : Mempermudah proses pelaks kegiatan Dengan skala prioritas				
	Dampak : Meningkatkan proses pemb di Desa/Kel				
	Masukan : Dana	Rp.	5.500.000		
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	b. Pencanaan Keg BBGRM	Keluaran : Terlaksananya perencanaan BBGRM	Kec.	1
			Hasil : Partisipasi masy.dan kegotong royongan Masyarakat meningkat	%	100
			Manfaat : Terpeliharanya semangat kegotong Royongan		
		c. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengembangan SAB Perdesaan	Dampak : Mempercepat pemerataan pembangunan		
			Masukan : Dana	Rp.	45.000.000
			Keluaran : Pembinaan Adm dan Tekhnis SAB Perdesaan	Desa %	1 100
		a. Monev dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemdes/ Kel	Hasil : - Masyarakat terlayani air bersih - Organisasi pengelola air bersih terbentuk		
			Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan AB masyarakat		
			Dampak : Derajat kesehatan masyarakat meningkat		
b. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Bintang Selaparang	Masukan : Dana	Rp.	110.000.000		
	Keluaran : Terbinanya Penyelenggaraan Pemdes/ Kel	D/K %	150 100		
	Hasil : Pemahaman terhadap Tupoksi				
c. Koordinasi Pengendalian Pelaks Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Manfaat : Terdatanya Penyelenggaraan Pemdes Dan Kel				
	Dampak : Mempercepat pembangunan				
	Masukan : Dana	Rp.	549.000.000		
a. Monev dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemdes/ Kel	Keluaran : Jumlah desa/kelurahan yang dinilai	D/K	20		
	Hasil : Terpilihnya desa/kelurahan juara	%	100		
	Manfaat : Masyarakat dan aparat desa termotivasi Dalam membangun				
b. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Bintang Selaparang	Dampak : Mempercepat pembangunan di desa				
	Masukan : Dana	Rp.	35.000.000		
	Keluaran : Jumlah RTM berkurang	Paket	1		
c. Koordinasi Pengendalian Pelaks Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Hasil : Kegiatan penanggulangan kemiskinan Daerah lebih focus terarah dan terintegrasi	%	100		
	Manfaat : Meningkatnya partisipasi dinas/instansi LSM dan masy. pengentasan kemiskinan				
	Dampak : Berkurangnya RTM				

5	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	a. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sehat sejahtera	Masukan : Dana Keluaran : Terbinannya Desa/Kel lokasi PPKSS Hasil : Pemahaman perempuan dlm PPKSS meningkat Manfaat : Meningkatkan kesejahteraan keluarga Dampak : Partisipasi perempuan meningkat	Rp. Desa %	6.000.000 2 20
6	Peningkatan Pemanfaatan TTG dlm Peningkatan SDA yg berwawasan Ling	a. Gelar TTG Tk. Propinsi	Masukan : Dana Keluaran : Promosi Produk unggulan dan hasil Temuan TTG Hasil : Termotivasinya penemu dan pengrajin Utk berinovasi Manfaat : Menambah wawasan dan pengetahuan Dampak : Penerapan TTG dlm rangka peningkatan Ekonomi	Rp. Paket %	18.434.000 1 100
		b. Gelar TTG Tk. Nasional	Masukan : Dana Keluaran : Promosi Produk unggulan dan hasil Temuan TTG Hasil : Termotivasinya penemu dan pengrajin Utk berinovasi Manfaat : Menambah wawasan dan pengetahuan Dampak : Penerapan TTG dlm rangka peningkatan Ekonomi	Rp. Paket %	44.565.700 1 100

BAB IV

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

No.	Uraian	Jadwal Waktu Pelaksanaan
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> - Operasional Kader Posyandu - Pembinaan Administrasi PNPM-MP - Pembentukan Pokja Profil Desa/Kel 	Januari s.d Desember Januari s.d Desember Februari s.d Agustus
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Monev DME - Monev Usaha Ekonomi Masyarakat 	Maret s.d Desember Maret s.d Desember
3.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa <ul style="list-style-type: none"> - Fasiltasi Musrenbangdes/Kel - Pencanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) - Pengelolaan, Pemanfaatan & Pengembangan Sarana Air Bersih Perdesaan 	Maret April April s.d Agustus
4.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa) - Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Bintang Selaparang - Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 	Januari s.d Desember Mei s.d Juni Maret – September

5.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sehat Sejahter (PPKSS)	Maret s.d Juni
6.	Program Peningkatan Pemanfaatan TTG dalam Peningkatan SDA yang berwawasan Lingkungan - Gelar TTG Tk. Propinsi - Gelar TTG Tk. Nasional	Februari s.d April April s.d Juni

TIME SCHEDULE

No.	Uraian	Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan a. Operasional Kader Posyandu b. Pembinaan Administrasi PNPM-MP c. Pembentukan Pokja Profil Desa/Kel												
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Monev DME b. Monev Usaha Ekonomi Masyarakat												
3.	Program Peningk. Partisipasi Masy. Dlm Membangun Desa a. Fasilitas Musrenbangdes/Kelurahan b. Pencanaan Kegiatan BBGRM c. Pengelolaan, Pemanf. & Pengemb. Sarana AB Pedesaan												
4.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a. Monev & Pelaporan (Pembinaan Penyelenggaraan Pempdes) b. Pelaksanaan Lomba Desa & Kelurahan Bintang Selaparang c. Koord.Pengend.Pelaks.Penangulangan Kemiskinan Daerah												
5.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan a. Peningk. Pemberdayaan Keluarga Sehat Sejahter (PPKSS) Program Peningk.Pemanf.TTG dlm Peningk.SDA yg Berwawasan Lingk.												
6.	a. Gelar TTG Tk. Propinsi b. Gelar TTG Tk. Nasional												

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPMPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 disusun dan dikembangkan untuk mengarahkan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan.

Dalam kerangka yang lebih luas maka rencana kerja sebagai alat kendali dan alat penilaian kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur BPMPD Kabupaten Lombok Timur yang merupakan pelaksana kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPMPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik.

Selong, 4 Februari 2010

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Kepala,

H. TAHMID ASRY, SH. M.Si
NIP. 19581119 198503 1 011